BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian permasalahan banjir akibat pembangunan JBC melalui mediasi masih jauh dari optimal dan efisien. Sejak awal, JBC seharusnya memprioritaskan pembangunan kolam retensi sebelum melaksanakan proyek fisik lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen AMDAL serta Pail Banjir yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Namun, implementasi kewajiban tersebut terabaikan hingga muncul desakan publik yang semakin meluas. Sejak awal masyarakat telah menyuarakan urgensi pembangunan kolam retensi sebagai langkah mitigasi banjir, tetapi pihak JBC baru merespons setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk melalui teguran resmi pemerintah dan eskalasi isu ini di media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak JBC tidak memiliki komitmen lingkungan yang kuat dan lebih bersikap reaktif dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sikap korporasi yang cenderung menunggu tekanan sebelum bertindak ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan oleh pemerintah daerah.
2. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimal dalam menjalankan perannya secara tegas dan transparan dalam mengawal proses ini sejak awal. Tidak adanya keterbukaan mengenai prosedur penerbitan izin lingkungan JBC serta lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi teknis mengakibatkan terbukanya celah bagi pihak JBC untuk mengabaikan

kewajibannya. Ketidaktegasan ini berdampak pada tertundanya pembangunan kolam retensi yang baru direalisasikan setelah banjir semakin parah dan tekanan publik meningkat. Respons pemerintah yang terkesan pasif semakin diperparah dengan lambatnya tindakan korektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak JBC. Surat teguran dan pemanggilan Direktur Utama JBC pun baru dilakukan ketika situasi sudah mencuat ke publik, memperlihatkan kecenderungan pemerintah yang lebih reaktif dalam menangani masalah ini. Serta tidak adanya sanksi konkret yang diberikan terhadap keterlambatan dan kelalaian JBC dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah hanya mengeluarkan teguran tanpa disertai tindakan tegas seperti denda administratif, penghentian sementara proyek, atau pencabutan izin sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Sikap permisif ini tidak hanya mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat terdampak, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi penegakan regulasi lingkungan di masa mendatang.

3. Selain itu, meskipun kolam retensi akhirnya dibangun, kapasitasnya yang tidak memadai masih menjadi permasalahan bagi masyarakat. Ironisnya, tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk memastikan solusi yang lebih efektif, memperlihatkan inkonsistensi dalam perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terdampak.
4. Transparansi komunikasi pemerintah dengan masyarakat pun masih menjadi persoalan serius. Selama proses penelitian, pemerintah terkesan tidak

transparan dalam memberikan informasi terkait perusahaan dan justru cenderung membenarkan keterlambatan JBC dalam pembangunan kolam retensi dengan alasan prosedural, seolah-olah semua harus melalui proses yang panjang dan tidak bisa dipercepat. Padahal sejak awal sudah jelas bahwa kolam retensi merupakan kewajiban yang harus direalisasikan sebelum proyek utama berjalan. Sikap ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan melindungi hak masyarakat yang terdampak.

4.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme pengawasan dalam penerapan kebijakan AMDAL, terutama dalam memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti JBC mematuhi kewajiban lingkungan sejak tahap perencanaan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkala, dengan transparansi dalam publikasi hasil evaluasi agar masyarakat dapat ikut mengawal prosesnya.
2. Pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas, seperti denda administratif, penghentian proyek sementara, atau pencabutan izin, harus diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan agar kedepannya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang lalai akan kewajibannya.

3. Meskipun kolam retensi telah dibangun, efektivitasnya masih dipertanyakan, sehingga pemerintah harus segera melakukan evaluasi teknis untuk memastikan kapasitasnya cukup dalam menampung air hujan dan tidak hanya sebagai formalitas pemenuhan AMDAL. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah harus memaksa JBC untuk melakukan perbaikan atau memperluas kapasitas kolam retensi tersebut.
4. Pemerintah juga harus memikirkan strategi jangka panjang dalam mengatasi banjir di Kota Jambi. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas drainase kota, menata ulang daerah resapan air, serta mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
5. Pihak JBC seharusnya tidak menunda kewajiban dalam membangun kolam retensi. Sejak awal pembangunan kolam ini harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas setelah proyek berjalan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sayangnya, hingga masalah banjir semakin parah, JBC masih beranggapan bahwa pembangunan mereka bukan faktor utama penyebab banjir, sehingga komitmen dalam menyelesaikan masalah ini terkesan setengah hati. Sebagai perusahaan besar, JBC harus memahami bahwa kepatuhan terhadap AMDAL bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
6. Jika pemerintah dan pihak JBC terus mengabaikan aspirasi masyarakat serta tidak ada tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini, masyarakat

dapat melaporkan permasalahan ini kepada lembaga seperti Ombudsman atau Komisi Lingkungan Hidup. Langkah ini perlu ditempuh agar perusahaan dan pemerintah menyadari bahwa masyarakat tidak akan diam menghadapi ketidakadilan lingkungan.

7. Selain menuntut tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, masyarakat juga harus introspeksi terhadap kebiasaan yang dapat memperburuk masalah banjir, salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk di saluran air dan sungai akan semakin memperparah banjir, sehingga perlu ada kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan. masyarakat bisa mulai dengan membiasakan memilah sampah, mengikuti program daur ulang, dan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air secara rutin.